

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia dewasa ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan nasional walaupun saat sekarang ini terbelenggu dengan krisis globalisasi prekonomian yang sedang melanda seluruh dunia. Khususnya Indonesia yang terkena dampak dari krisis globalisasi yang sangat parah. Akan tetapi bagaimana pun juga pembangunan yang dilaksanakan tidak boleh ikut terbengkalai. Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan dewasa ini tercapainya masyarakat adil dan makmur merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional tersebut maka pemerintah berusaha dengan segala kemampuan untuk melaksanakan pembangunan disegala bidang, baik pembangunan fisik material maupun mental spiritual. Dalam hal ini perlu adanya usaha keras dari pemerintah sehingga tujuan nasional dapat terwujud.

Pelaksanaan pembangunan bukan hanya kewajiban dan tanggungjawab pemerintah saja, akan tetapi merupakan tanggungjawab dari seluruh lapisan masyarakat, ini senada dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan di pedesaan yang mana peranan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan di pedesaan berperan aktif. Hal ini dapat dilihat terhadap realisasi pembangunan yang sudah tercapai, kondisi tersebut secara terus-menerus diharapkan dapat berjalan sesuai dukungan dari lapisan masyarakat baik bersifat tenaga, pikiran,

serta dana untuk kelanjutan pelaksanaan pembangunan khususnya tingkat pedesaan.

Sumber pembiayaan pembangunan pedesaan terutama dari hasil pemberian bantuan dari pemerintah setiap tahunnya, yang merupakan suatu usaha untuk partisipasi dari masyarakat itu sendiri, disamping bantuan dana yang diberikan pemerintah untuk dana pembangunan pedesaan setiap tahunnya. Maksud mendorong dan merangsang partisipasi sendiri yang datang dari masyarakat sendiri. Namun dalam kenyataannya pembangunan pedesaan yang pembiayaannya bersumber dari masyarakat sering mengalami hambatan sebagai berikut :

1. Pembangunan hanya menguntungkan sebagian kecil dan tidak menguntungkan masyarakat banyak, bahkan sisi ekstrim dirasakan merugikan.
2. Pembangunan meskipun dimaksud untuk menguntungkan rakyat banyak, tetapi kurang memenuhi maksud tersebut.
3. pembangunan dimaksud untuk menguntungkan rakyat banyak, dan rakyat memahaminya tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan itu.
4. Pembangunan dipahami dan menguntungkan rakyat, tetapi sejak semula rakyat tidak diikuti sertakan.¹

Dari kenyataan yang dimaksud di atas, merupakan kegagalan pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya yang tidak mencapai sasaran yang dikehendaki. Hal ini disebabkan partisipasi masyarakat yang tidak diikutsertakan secara menyeluruh, sehingga pelaksanaan pembangunan yang diadakan tidak dapat mencapai sasaran yang bertujuan akhirnya baik dan berguna pada masyarakat itu sendiri. Salah satu usaha yang dapat ditempuh dalam meningkatkan peranan masyarakat adalah dengan mensosialisasikan pentingnya akan makna

¹ Kartasmita Gunanjar, *Administrasi Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia*, Puspa LP3Es, Jakarta, 2002, hal. 56.